# **Kerangka Acuan Kegiatan**

**Diskusi Publik “Memastikan Keberlanjutan Komitmen**

**Keterbukaan Pemerintah Indonesia Kedepan”**

**Dalam Rangka Indonesia Open Government Week 2024**

#

## **Latar Belakang**

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan pada aspek partisipasi dan pelibatan masyarakat sipil dalam pengambilan kebijakan melalui inisiatif Open Government Indonesia (OGI). Open government atau keterbukaan pemerintah merupakan upaya mendorong terwujudnya nilai-nilai keterbukaan pemerintah, diantaranya transparansi, partisipatif, akuntabel, inklusif, dan inovatif, melalui semangat ko-kreasi (*co-creation*) antara pemerintah (*government*) dan masyarakat sipil (*civil society*). Inisiatif OGI dimulai sejak tahun 2011 setelah Indonesia bersama 8 (delapan) negara lainnya mendeklarasikan komitmen global Open Government Partnership (OGP).

Sejak 2011 hingga saat ini, pemerintah Indonesia bersama sejumlah Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) telah menjalankan 7 (tujuh) Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah Indonesia (RAN OGI). Pada RAN OGI VII Periode 2023-2024, terdapat 15 komitmen dalam 6 isu strategis yang dijalankan, antara lain isu strategis anti-korupsi dan anggaran; ruang kewargaan dan demokrasi; pelayanan publik yang inklusif; akses terhadap keadilan; kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial; dan energi, lingkungan, dan sumber daya alam. Proses ko-kreasi antara pemerintah dan OMS dalam pelaksanaan RAN OGI telah membuahkan sejumlah capaian, diantaranya tersedianya layanan informasi bantuan hukum yang terbuka dan terintegrasi; tersedianya sistem informasi pengadaan barang dan jasa; tersedianya mekanisme aduan masyarakat terkait pelanggaran dan disinformasi pemilu; terbukanya akses pelayanan publik bagi kelompok marginal; terbukanya akses partisipasi bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan; dan sejumlah capaian lainnya.

Namun demikian, bukan berarti tidak ada kendala dalam pelaksanaan komitmen keterbukaan pemerintah Indonesia. Terhadap beberapa komitmen yang disepakati terkait keterbukaan informasi lingkungan dan sumber daya alam, masih stagnan dalam pelaksanaannya. Demikian pula komitmen keterbukaan informasi belanja negara belum dipenuhi, sehingga sulit mengukur belanja negara yang berkualitas. Dalam bidang anti korupsi, keterbukaan dana kampanye belum menjadi isu prioritas. Sementara itu, partisipasi masyarakat sipil secara luas dan bermakna dalam kerangka akuntabilitas sosial kebijakan, masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan ko-kreasi keterbukaan pemerintah Indonesia. Selain itu, Indonesia sendiri belum memiliki payung hukum dan peta jalan penyelenggaraan open government yang berkelanjutan.

Pada 27-31 Mei 2024 yang akan datang, Sekretariat Nasional Open Government Indonesia bersama OMS Keterbukaan Pemerintah Indonesia akan menyelenggarakan Open Government Week (OGI Week 2024). Momentum ini menjadi penting untuk melihat kembali perjalanan penyelenggaraan keterbukaan pemerintah di Indonesia. Lebih jauh, OGI Week 2024 menjadi momen krusial untuk memastikan keberlanjutan penyelenggaraan keterbukaan pemerintah di Indonesia, mengingat pada Oktober 2024 yang akan datang, pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029 akan segera berjalan. Oleh karena itu, dalam rangkaian penyelenggaraan OGI Week 2024 ini, Medialink, Transparency International Indonesia, dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang tergabung bersama OMS Keterbukaan Pemerintah Indonesia berinisiatif menyelenggarakan diskusi publik dengan judul “**Memastikan Keberlanjutan Komitmen Keterbukaan Pemerintah Indonesia Kedepan**”.

## **Tujuan**

Kegiatan diskusi publik dalam rangkaian Open Government Week 2024 ini bertujuan untuk:

* 1. Mensosialisasikan peluang dan tantangan penyelenggaraan keterbukaan pemerintah Indonesia
	2. Mendengar komitmen keberlanjutan penyelenggaraan Open Government Indonesia

## **Waktu dan Tempat**

Kegiatan ini akan berlangsung pada:

Hari dan tanggal : Selasa, 28 Mei 2024

Pukul : 09.00 - 12.00 WIB

Lokasi : Ruang DH1-2, Gedung Kementerian PPN/Bappenas, Jl.

Taman Suropati No.2, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat

Format : Diskusi panel

## **Target Peserta**

Kegiatan ini akan menyasar seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Open Government Indonesia, antara lain:

1. Kementerian dan Lembaga pelaksana komitmen Open Government Indonesia
2. Organisasi Masyarakat Sipil Keterbukaan Pemerintah Indonesia
3. Media
4. Akademisi, mahasiswa perguruan tinggi, dosen, dan peneliti
5. Masyarakat umum yang tertarik pada isu keterbukaan pemerintah Indonesia

## **Pembicara**

* 1. Moderator

 Gina Sabrina, Project Manager Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM

Indonesia.

* 1. Narasumber
		1. Dahnil Anzar Simanjuntak, Tim Prabowo-Gibran
		2. Yanuar Nugroho, Open Government Partnership Envoy
		3. Danang Widoyoko, Open Government Indonesia Steering Committee
		4. Dewi Barnas, OGP Support Unit

## **Rundown Acara**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Waktu (GMT+7)** | **Durasi** | **Kegiatan** |
| 09.00 - 09.10 | 10 menit | Registrasi |
| 09.10 - 09.20 | 10 menit | Moderator membuka acara dan memperkenalkan narasumber |
| 09.20 - 09.50 | 30 menit | Pemaparan Yanuar Nugroho, Open Government Partnership EnvoyPertanyaan kunci oleh moderator:1. Sebagai OGP Envoy, bagaimana refleksi perjalanan open government Indonesia selama ini?
2. Bagaimana keberlanjutan perjalanan open government Indonesia ke depan?
 |
| 09.50 - 10.20 | 30 menit | Pemaparan Dewi Barnas, OGP Support UnitPertanyaan kunci oleh moderator:1. Sebagai OGP Support Unit, bagaimana refleksi perjalanan open government Indonesia selama ini?
2. Bagaimana keberlanjutan perjalanan open government Indonesia ke depan?
 |
| 10.20 - 10.50 | 30 menit | Pemaparan Danang Widoyoko, Open Government Indonesia Steering CommitteePertanyaan kunci oleh moderator:1. Bagaimana refleksi OMS dalam penyelenggaraan open government Indonesia?
2. Bagaimana peran OMS dalam penyelenggaraan open government ke depan?
 |
| 10.50 - 11.20 | 30 menit | Pemaparan Dahnil Anzar Simanjuntak, tim Prabowo-Gibran. Pertanyaan kunci oleh moderator:1. Bagaimana sikap pemerintahan Prabowo-Gibran terhadap penyelenggaraan keterbukaan pemerintah Indonesia selama ini?
2. Dalam dokumen visi dan misi Asta Cita Prabowo Gibran disebutkan beberapa hal yang berkaitan dengan keterbukaan pemerintah Indonesia, antara lain pada Asta Cita ke-7 yakni memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, dengan mengatur sistem pendanaan dan pembiayaan politik yang menjamin independensi, transparansi, mencegah korupsi, dan menjaga keberlangsungan demokrasi serta reformasi dan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi. Bagaimana komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran mewujudkan misi ini dalam kaitannya dengan open government Indonesia?
 |
| 11.20 - 11.50 | 30 menit | Diskusi dan tanya jawab |
| 11.50 - 12.00 | 10 menit | Penutupan oleh moderator |

##

## **Rencana Anggaran Biaya (RAB)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Deskripsi | Unit | Rate (rupiah) | Jumlah (rupiah) |
| Narasumber (fullday) | 4 | 2.500.000 | 10.000.000 |
| Moderator | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Total | 11.500.000 |

1. **Informasi Lebih Lanjut**

Kerangka acuan ini memuat ringkasan Diskusi Panel “Memastikan Keberlanjutan Komitmen Keterbukaan Pemerintah Indonesia Kedepan”. Untuk komunikasi dan informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi kami melalui email di bawah ini:

1. Medialink: +6285742220506
2. Transparency International Indonesia: +628126992667
3. Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia: +6281398466750